

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

YOHANA PRANITA

2016/16060122

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SUMATERA
BARAT**

Nama : Yohana Pranita
NIM/TM : 16060122/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

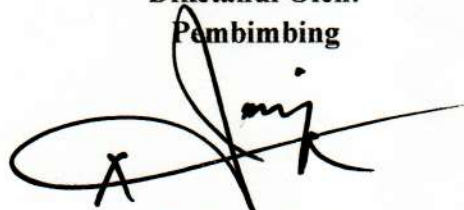
Padang, April 2021

**Disetujui Oleh :
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi**



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

**Diketahui Oleh:
Pembimbing**



Dr. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

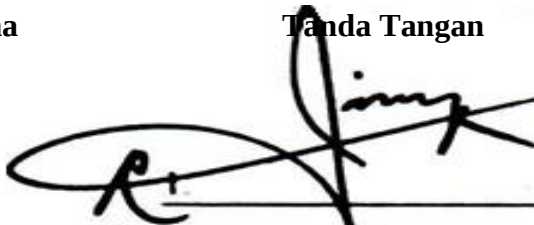
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT

Nama : Yohana Pranita
NIM/TM : 16060122/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2021

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Dr. Idris, M.Si	
2	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	
3	Anggota	: Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Pranita
NIM/Th. Masuk : 2016/16060122
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Penuh / 30 Juni 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : JL RE Martadinata, Kota Sungai Penuh
No. HP/Telephone : 085379801315
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera
Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis / skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Pada karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, April 2021




Yohana Pranita
NIM : 16060122

ABSTRAK

Yohana Pranita (16060122) : Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat, dibawah bimbingan Bapak Dr. Idris, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; (1) Sejauhmana pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat (2) Sejauhmana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat dan (3) Sejauhmana Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat.

Penelitian ini berjenis deskriptif dan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan data panel yang diperoleh dari lembaga terkait untuk periode 2015-2018 kemudian dilakukan analisis menggunakan model regresi panel dengan melakukan pengujian asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya secara parsial (1) Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat (2) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini pemerintah dan lembaga terkait selaku pemegang kendali dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik, khususnya dari belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi terhadap daerah-daerah di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul “*Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat*” dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Idris, M.Si selaku pembimbing yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan serta motivasi dan saran-saran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Melti Roza Adry.,SE,ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Negeri Padang dan ibu Dewi Zaini Putri, SE., MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ariusni, SE, M.Si dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan referensi.
7. Kak Asma Lidya, A. Md (Kak Lid) yang telah memberikan motivasi dan masukan serta bantuan kepada penulis dalam penyelesaian administrasi skripsi ini.
8. Kepada Ahmaddizon yang telah memberikan motivasi, membantu, menemani dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi masing-masing serta mendengarkan curhatan dikala sedih dan bahagia.
9. Kepada sahabat-sahabat tercinta seperjuangan Yosi Tamara, Novilia Hartisa, Mediani Puspa Rahayu, Anastasyia Dwi Utami, Dheylya Permatasari dan Lara Yuli Rusdy yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kos BB16 yang telah memotivasi, membantu, mendengarkan curhatan hati, dan mengisi hari-hari di kost menjadi lebih menyenangkan.
11. Kepada Aat Darmawan yang sudah membantu, berbagi ilmu, do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali dan senior-senior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

13. Kepada seluruh kawan-kawan Konsentrasi Ekonomi Publik dan sahabat-sahabat terdekat angkatan 2016 yang telah mendukung memberi semangat dan membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Aamiin. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, April 2021

Penulis

Yohana Pranita

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	16
A. Kajian Teori	16
1. Ketimpangan Pendapatan	16
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	22
3. Belanja Modal	25
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis	30
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Jenis Data dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Definisi Operasional Variabel.....	34

1. Belanja Modal	34
2. Pertumbuhan Ekonomi	35
3. Ketimpangan Pendapatan	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
1. Analisis Deskriptif.....	35
2. Analisis Induktif	36
3. Pengujian Hipotesis.....	42
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	46
1. Kondisi Geografis Sumatera Barat.....	46
2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat.....	47
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
1. Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat	49
2. Pertumbuhan Ekonomi	51
3. Belanja Modal	54
C. Analisis Induktif.....	56
D. Pembahasan.....	65
1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat	65
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat	68
3. Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Bersama-sama Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat	70
BAB V	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ketimpangan Pendapatan Menurut Gini Ratio di Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2015-2018	3
Tabel 1.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat.....	6
Tabel 1.3	Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (Ribuan Rupiah)	9
Tabel 1.4	Realisasi Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di Sumatera Barat Tahun 2015-2018.....	10
Tabel 4.1	Jumlah dan Laju Penduduk di Sumatera Barat tahun 2015-2018....	48
Tabel 4.2	Ketimpangan Pendapatan Menurut Gini Ratio di Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2015-2018 (%).....	50
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat (%)......	52
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Modal menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat (Ribuan Rupiah).....	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Chow	57
Tabel 4.6	Hasil Uji Hausman	58
Tabel 4.7	Hasil Uji Langrange Multiplier	58
Tabel 4.8	Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	59
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Gini Ratio, 2010-2018 di Sumatera Barat.....	2
Gambar 1.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di Sumatera Barat	11
Gambar 2.1	Kurva Lorenz.....	19
Gambar 2.2	Perkiraan Koefisien Gini.....	20
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat	31
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

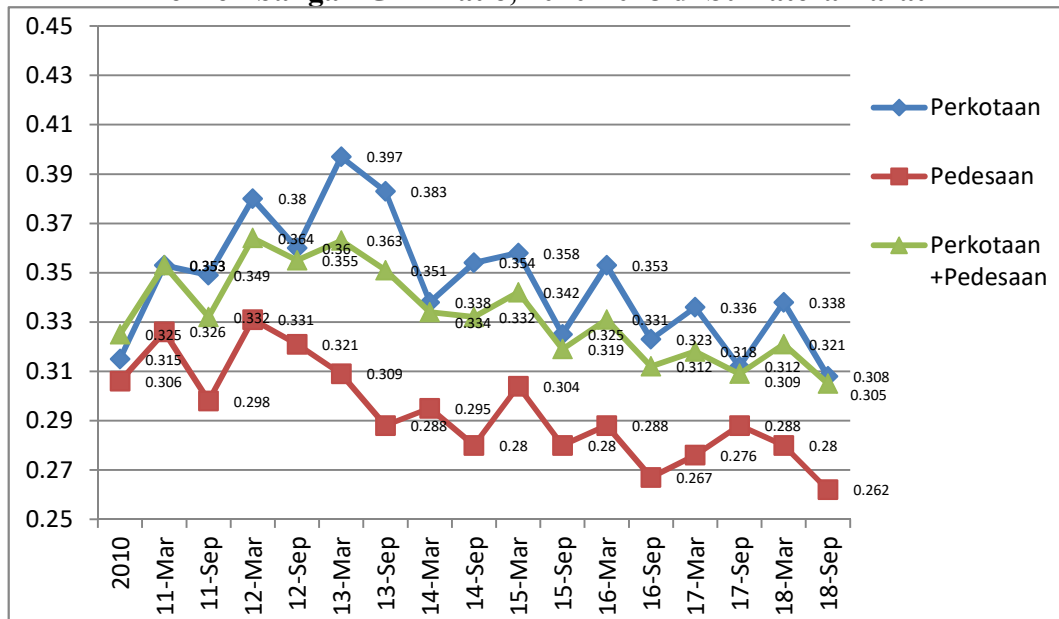
A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah berupaya untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang tinggi. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus diikuti dengan pengurangan tingkat ketimpangan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana terjadinya ketidakmertaan pendapatan suatu masyarakat, sebagaimana pada satu kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan satu kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi fenomena penting yang masih terus perlu dikaji dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil dan digunakan oleh pemerintah agar lebih terarah, serta berjalan dengan efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan terjadi di setiap negara, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang maupun negara maju.

Distribusi pendapatan juga dialami di daerah Sumatera Barat. Pendapatan daerah di Sumatera Barat masih mengalami ketimpangan pendapatan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Di Sumatera Barat ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari Gini Ratio. Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio (BPS, 2019).

Gambar 1.1
Perkembangan Gini Ratio, 2010-2018 di Sumatera Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Berita Resmi Statistik tentang Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat, pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,305. Angka ini turun sebesar 0,016 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,321. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 sebesar 0,312, tercatat penurunan yang relatif lebih kecil sebesar 0,007 poin.

Berikut gambaran ketimpangan pendapatan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2015-2018 yang dilihat dalam Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ukuran ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan (BPS, 2019).

Tabel 1.1 Ketimpangan Pendapatan Menurut Gini Ratio di Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2015-2018 (%).

Kabupaten/Kota	Gini Ratio			
	2015	2016	2017	2018
Kab. Kepulauan Mentawai	0,28	0,31	0,32	0,31
Kab. Pesisir Selatan	0,28	0,27	0,30	0,26
Kab.Solok	0,29	0,31	0,29	0,30
Kab. Sijunjung	0,29	0,33	0,33	0,30
Kab. Tanah Datar	0,33	0,30	0,26	0,29
Kab. Padang Pariaman	0,30	0,26	0,28	0,30
Kab. Agam	0,31	0,29	0,28	0,26
Kab. Limapuluh Kota	0,33	0,27	0,26	0,28
Kab. Pasaman	0,30	0,30	0,26	0,27
Kab. Solok Selatan	0,38	0,31	0,30	0,31
Kab. Dharmasraya	0,36	0,30	0,25	0,26
Kab. Pasaman Barat	0,29	0,31	0,29	0,29
Kota Padang	0,35	0,35	0,34	0,34
Kota Solok	0,34	0,34	0,30	0,30
Kota Sawahlunto	0,33	0,32	0,30	0,31
Kota Padang Panjang	0,37	0,38	0,30	0,29
Kota Bukittinggi	0,34	0,33	0,31	0,34
Kota Payakumbuh	0,37	0,34	0,30	0,30
Kota Pariaman	0,33	0,34	0,30	0,32
Sumatera Barat	0,34	0,33	0,32	0,32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar

Ukuran ketimpangan secara menyeluruh dalam pengukuran ketimpangan adalah koefisien gini, yang bisa memiliki nilai berapa pun, berkisar dari 0 (kemerataan distribusi sempurna) sampai 1 (ketimpangan distribusi sempurna). Bahkan bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya mengalami ketimpangan yang relatif tinggi memiliki koefisien Gini berada di antara 0,50 dan 0,70, sedangkan bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata memiliki koefisien Gini antara 0,2 dan 0,35 (Todaro dan Smith, 2011).

Berdasarkan tabel 1.1 Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2015-2018 berfluktuasi. Ketimpangan pendapatan terendah di Sumatera Barat pada tahun 2018 berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Dharmasraya dengan tingkat ketimpangan yaitu sebesar 0,26 persen. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga terjadi ketimpangan yang rendah. Ketimpangan pendapatan tertinggi berada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi yaitu sebesar 0,34 persen. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan daerah lainnya di Sumatera Barat. Sehingga ketimpangan pendapatan yang paling tinggi di Sumatera Barat 2018 yaitu berada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Menurut Nangarumba (2015) perubahan pertumbuhan ekonomi menimbulkan permasalahan yang salah satunya ketimpangan pendapatan. Sedangkan berdasarkan teori Todaro dan Smith Kota Padang dan Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam kategori ketimpangan yang tinggi. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya tertinggi di Indonesia. Hal ini terukur dari rasio gini, yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan kelas pendapatan. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, rasio gini perkotaan lebih tinggi daripada rasio gini di pedesaan. Meski secara umum menunjukkan tren penurunan, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan tipis (Republika.co.id, 2017) . Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pasti selalu ada. Cara

membedakannya adalah melihat seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada setiap daerah.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah harus berkaitan dengan semua aspek yang berkontribusi terhadap perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Pada prinsipnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Sjafrizal (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan tiap tahunnya. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan tiap tahunnya (Rizky et al., 2016). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada proses pembangunan dan menyangkut kesejahteraan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama bagi negara-negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan barang dan jasa yang di produksi masyarakat.

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk salah satunya dalam hal pembangunan. Akan tetapi, menurut Mahardiki dan Santoso (2013),

proses pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa daerah mengalami laju pembangunan yang cepat sementara daerah yang lainnya mempunyai laju pembangunan yang lambat.

Berikut Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat (%).

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2015	2016	2017	2018
Kab. Kepulauan Mentawai	5,20	5,02	5,12	4,91
Kab. Pesisir Selatan	5,73	5,33	5,41	5,35
Kab. Solok	5,44	5,31	5,32	5,22
Kab. Sijunjung	5,69	5,26	5,26	5,09
Kab. Tanah Datar	5,33	5,03	5,11	5,07
Kab. Padang Pariaman	6,14	5,52	5,58	5,46
Kab. Agam	5,52	5,41	5,43	5,26
Kab. Limapuluh Kota	5,61	5,32	5,33	5,26
Kab. Pasaman	5,34	5,07	5,08	5,00
Kab. Solok Selatan	5,35	5,12	5,15	5,03
Kab. Dharmasraya	5,75	5,42	5,44	5,31
Kab. Pasaman Barat	5,70	5,33	5,34	5,24
Kota Padang	6,41	6,22	6,23	6,09
Kota Solok	5,97	5,76	5,76	5,68
Kota Sawahlunto	6,03	5,73	5,74	5,52
Kota Padang Panjang	5,91	5,80	5,80	5,73
Kota Bukittinggi	6,14	6,05	6,08	6,02
Kota Payakumbuh	6,19	6,09	6,12	6,05
Kota Pariaman	5,79	5,59	5,61	5,50
Sumatera Barat	5,53	5,27	5,30	5,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar

Data diatas merupakan persentase dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari tabel 1.2 dapat diambil kesimpulan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat berfluktuasi selama periode 2015-2018. Pertumbuhan PDRB di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki laju pertumbuhan yang rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat yaitu sebesar 4,91 persen, dan laju pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018 termasuk yang paling terendah selama 2015-2018. Dengan indeks Gini yaitu sebesar 0,31 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap distribusi pendapatan. Yang artinya jika pertumbuhan ekonomi menurun maka ketimpangan pendapatan juga akan mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan oleh rendahnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Gini ratio Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,31 persen di tahun 2018.

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada di Kota Padang dengan PDRB sebesar 6,09 persen, dikarenakan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat didukung oleh infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga mendukung perekonomian daerah tersebut. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap distribusi pendapatan. Artinya, jika terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan Gini ratio Kota Padang tahun 2018 yaitu sebesar 0,34 persen.

Semakin tinggi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan positif. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan akan meningkat. Sebaliknya, jika ketimpangan pendapatan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga (Djohan et al., 2016).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pendapatan rata-rata tinggi dan pembangunan ekonomi yang adil antar daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Target RPJPN dibayangkan pada tahun 2005-2025 hanya mampu mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Peran pemerintah daerah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Menurut Todaro dan Smith (2011) salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara adalah akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Dalam melakukan penanaman modal tidak hanya pihak swasta, pihak pemerintah pun juga ikut berperan dalam melakukan pembangunan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal mewakili biaya dalam pengadaan infrastruktur, dimana semakin baik infrastruktur yang berkualitas dan semakin banyak infrastruktur diyakini dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan (Rizky et al., 2016). Dalam realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018.

Tabe 1.3 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (Ribuan Rupiah)

Alokasi Anggaran	2016	2017	2018*)
Belanja Langsung	1.903.593.197,54	2.093.842.821,72	2.637.361.836,74
a. Belanja Pegawai	18.302.036,32	113.099.206,04	28.411.330,00
b. Belanja Barang dan Jasa	895.361.389,79	867.235.428,58	1.495.885.893,47
c. Belanja Modal	989.929.771,43	1.113.508.187,10	1.113.064.613,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2017-2018

Catatan : *) data APBD

Alokasi belanja langsung didominasi untuk kebutuhan belanja modal, yaitu sebesar 1.113,51 miliar rupiah. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk belanja barang dan jasa, yaitu sebesar 867,23 miliar rupiah. Adapun alokasi

belanja modal Sumatera Barat dapat di lihat pada Realisasi Belanja Modal menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di Sumatera Barat Tahun 2015-2018

Tahun	Belanja Modal (Ribuan Rupiah)	Pert (%)
2015	3.442.418.870,60	0,18
2016	4.215.504.276,48	0,22
2017	4.298.471.477,98	0,02
2018	3.848.183.743,09	-0,10

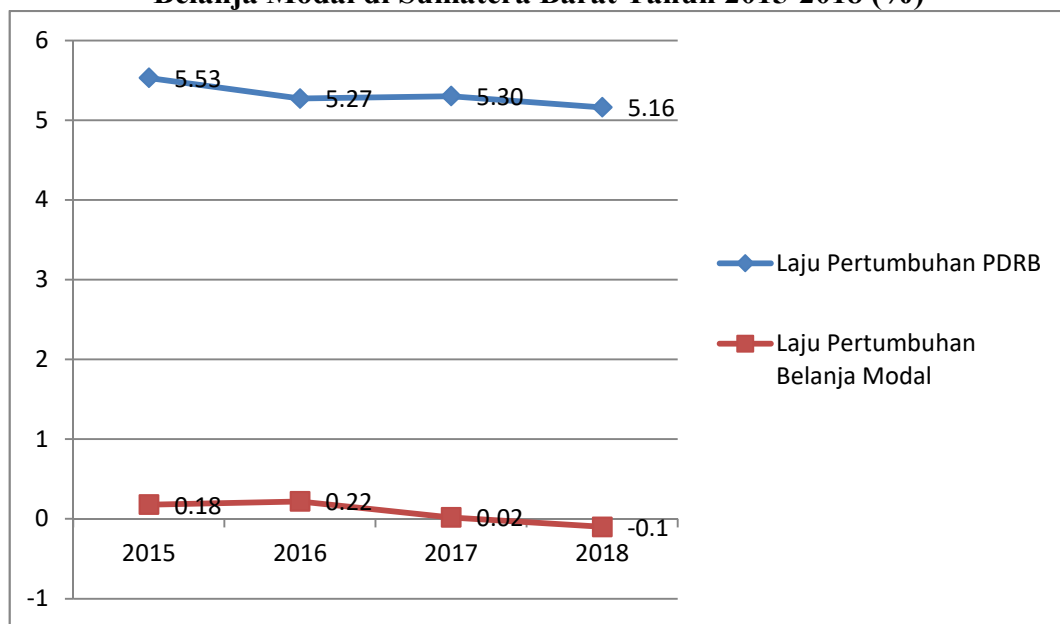
Sumber :Badan Pusat Statitik, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2015-2018

Pada tabel 1.3 realisasi belanja modal menurut kabupaten/kota 2015-2018 di Sumatera Barat memiliki angka tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 4.298.471.477,98 ribu rupiah. Belanja modal pada data di atas mengalami peningkatan pada setiap tahunnya kecuali tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal tahun 2018 mengalami penurunan disebabkan tingginya kebutuhan bidang pendidikan yang mesti ditanggung Sumatera Barat pascapengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi membuat porsi belanja modal di Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 merosot. Kemerosatan belanja modal yang notabene untuk kebutuhan infrastruktur jauh dari target nasional (harianhaluan.com, 2017).

Belanja modal pemerintah daerah juga mengalami penurunan akibat tertundanya 186 proyek infrastruktur di Sumatera Barat (Bank Indonesia, 2018). Hal ini dibuktikan dalam realisasi belanja langsung lebih banyak di peruntukkan untuk belanja modal dan untuk belanja barang dan jasa. Yang artinya kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik dan terarah dalam suatu perokonomian. Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan

infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di Sumatera Barat Tahun 2015-2018.

Gambar 1.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di Sumatera Barat Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar(data diolah)

Pada gambar 1.2, data laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan belanja modal di Sumatera Barat berfluktuasi. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB adalah sebesar 5,53 persen dengan laju belanja modal adalah sebesar 0,18 persen. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB menurun sebesar 0,34 poin menjadi 5,27 persen dan mengalami peningkatan pada laju pertumbuhan belanja modal sebesar 0,04 poin menjadi 0,22 persen. Pada tahun 2017 laju PDRB naik sebesar 0,03 persen sedangkan laju pertumbuhan belanja modal turun sebesar 0,20 poin menjadi 0,02 persen. Hingga tahun 2018 laju pertumbuhan PDRB adalah sebesar 5,16 dan laju pertumbuhan belanja modal sebesar -0,10. Seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi belanja modal meningkatkan kebutuhan untuk pembangunan yang lebih baik dan lebih terarah dalam suatu perekonomian. Sehingga belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mengatur pengeluaran pemerintah merupakan komponen yang perlu di perhatikan dalam mengendalikan suatu perekonomian. Salah satu pengeluaran pemerintah yang produktif yaitu belanja modal akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran yang digunakan dalam belanja modal yaitu berupa penyediaan infrastruktur seperti pengadaan tanah, listrik, transportasi, sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan. Pada sektor publik alokasi belanja modal sangat dibutuhkan, karena disamping dapat memberi efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah tersebut melalui implementasi program-program padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi bagi suatu perusahaan.

Melalui alokasi belanja modal yang secara optimal bersinergi dengan alokasi belanja lainnya, pada tujuan makro ekonomi, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ketimpangan pendapatan terpenuhi. Terpenuhiya kebutuhan pelayanan publik masyarakat akan meningkatkan investor melakukan penanaman modal yang akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri & Natha, 2014).

Djohan et al., (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa variabel yaitu variasi pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kecil dan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh kecil dan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, variasi dalam pengeluaran pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana pengeluaran pemerintah pada penelitian ini dihitung secara total. Penelitian ini hanya meneliti efek dari variasi dalam pengeluaran pemerintah untuk variasi dalam pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah antara provinsi-provinsi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung dari belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, metode penelitian dan tempat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel endogen ketimpangan pendapatan dengan variabel eksogen belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk kelengkapan teori pada skripsi penulis. Sehubungan dengan penjelasan di atas dapat diketahui adanya pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat serta pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi panel. Maka penulis ingin mengkaji pengaruh antara keduanya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dituangkan dalam

bentuk skripsi berjudul **“Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang penelitian ilmiah.
- b) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai tambahan Khazanah ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan Ekonomi Keuangan Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan sehingga dapat menjadi sumber referensi keilmuan ekonomi.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah atau instansi untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah agar lebih terarah, serta berjalan dengan efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan. Dan sebagai referensi ilmu pengetahuan bagi Peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro dan Smith (2011), Ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proposional dari pendapatan nasional total di antara beberapa rumah tangga dalam negara. Para ekonom dalam tujuan analitis dan kuantitatif untuk mengukur ketimpangan membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Dua ukuran distribusi pendapatan tersebut yaitu distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) dan distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (*functional or factor share distribution of income*).

Personal distribution of income secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Dalam ukuran ini cara dan sumber mendapatkan penghasilan tidak dipermasalahkan. Yang dilihat dan diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, yang bisa berasal dari gajinya karena berkerja, atau berasal dari sumber lainnya seperti tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga tidak dipermasalahkan. Sedangkan ukuran *functional or factor share distribution of income* yang berupaya menjelaskan pangsa pendapatan nasional total yang

diterima tiap faktor produksi/*production factor* (lahan, tenaga kerja, dan modal). Ketimbang memandang orang-orang sebagai entitas terpisah, teori distribusi pendapatan fungsional berusaha menemukan persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang didistribusikan dalam bentuk uang sewa, bunga, dan laba (yakni, pengembalian atas lahan serta modal keuangan dan fisik). Walaupun orang-orang tertentu dapat menerima pendapatan dari semua sumber itu, hal ini tidak merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional (Todaro dan Smith, 2011).

Myrdal (1957) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si pemilik modal mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tidak memiliki modal menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effects*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effects*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk keadaan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional diantara negara-negara terbelakang (Jhingan, 2016).

Menurut Sjafrizal (2008) ketimpangan pendapatan potensial di antara daerah akan selalu ada karena berbagai faktor, termasuk sumbangan faktor berbeda antar daerah. Semakin besar perbedaan pendapatan per kapita antar daerah berarti ketimpangan pendapatan antar daerah akan melebar (*divergen*). Banyak faktor yang menentukan ketimpangan antar daerah, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah, perdagangan, faktor-faktor produksi antar daerah, alokasi investasi

publik dan swasta di seluruh wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah yang berbeda akan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antar daerah. Alokasi investasi pemerintah termasuk belanja modal. Oleh Karena itu, perbedaan dalam belanja modal dan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan antar daerah.

Ketimpangan yang tinggi antar wilayah dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi hingga kestabilan politik suatu Negara. Oleh sebab itu perlu diupayakan berbagai kebijakan-kebijakan supaya ketimpangan yang terjadi antar wilayah tidak terlalu terlihat. Akan tetapi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan ekonomi sangatlah sulit. Salah satu yang paling utama disebabkan adanya *trade off* antara ketimpangan pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi (Anshari et al., 2018).

Disamping pengukuran ketimpangan diatas, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia (BPS, 2018). Berdasarkan BPS (2018), ukuran tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

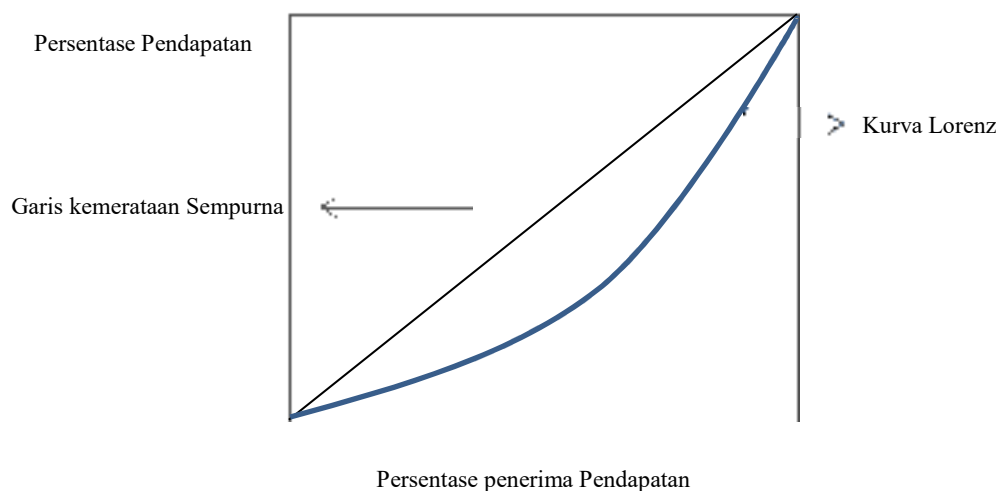
- 1) tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen,
- 2) ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta
- 3) ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Ada beberapa cara menganalisis ukuran ketimpangan pendapatan yakni :

a) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah alat untuk menganalisis pendapatan perorangan. Kurva Lorenz diperkenalkan oleh Conrad Lorenz seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka. Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal memperlihatkan jumlah penerimaan pendapatan, tidak dalam angka absolut tetapi dalam *persentase kumulatif*. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk (Arsyad L, 2004).

Gambar 2.1
Kurva Lorenz



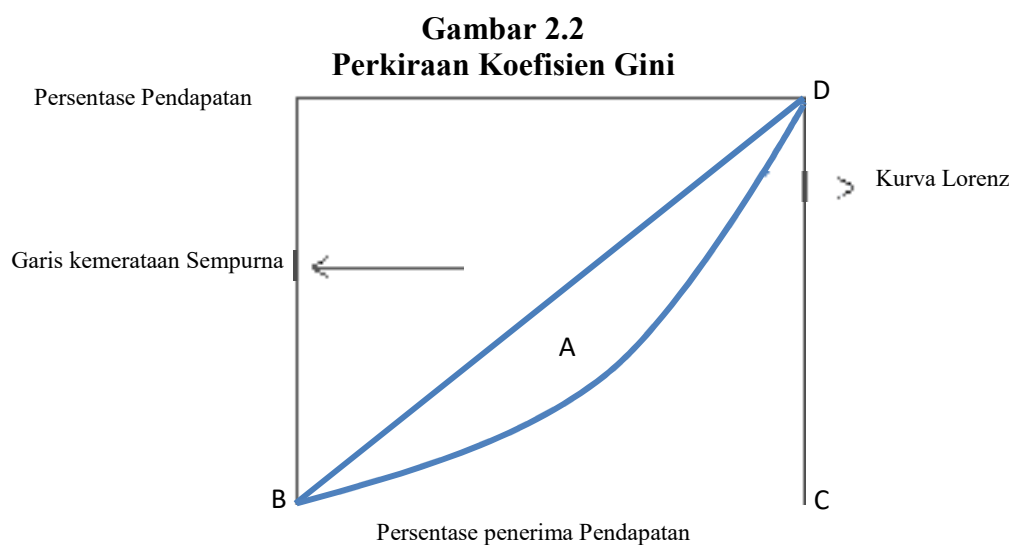
Sumber : Todaro (2011)

Menurut Arsyad, L (2004) kurva Lorenz memperlihatkan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total selama waktu tertentu. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal

(kemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Dalam kurva Lorenz keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan akan membentuk kurva Lorenz semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah.

b. Koefisien Gini

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio (BPS, 2018). Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa didapatkan dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana terdapat kurva Lorenz tersebut. Koefisien Gini diukur secara grafis dengan membagi bidang yang terletak di antara garis pemerataan sempurna dengan kurva Lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan dalam diagram Lorenz.



Sumber : Todaro (2011)

$$\text{Koefisien Gini} = \frac{\text{Daerah A}}{\text{Luas } \Delta BCD}$$

Secara sistematis rumus koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut :

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Atau

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i(Y_{i+1} + Y_i)$$

Keterangan:

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Rasio Gini bernilai anatar 0 dan 1, Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly inequal*, di mana seluruh penduduk berada pada satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan *perfectly equal*, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu Negara. Jadi, semakin tinggi indeks Gini, semakin tinggi ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (BPS, 2018).

Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini menurut Arsyad L (2004), yaitu:

- 1) Antara 0,50-0,70 adalah distribusi pendapatannya sangat timpang.
- 2) Antara 0,36-0,49 adalah distribusi pendapatannya sedang.

3) Antara 0,20-0,35 adalah distribusi pendapatannya relatif merata.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw, N (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun.

Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan pertumbuhan yang lambat terjadi apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. Hal ini dapat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya suatu wilayah tersebut atau membandingkannya dengan wilayah lain. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDB pada satu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno, S(2006).

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi } (\Delta Y) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_t} \times 100$$

Dimana

ΔY = Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDB (%)

PDB_t = nilai PDB tahun t

PDB_{t-1} = nilai PDB tahun sebelumnya.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pemerintah harus ikut serta melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di harapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Bila kebutuhan dan kesejahteraan meningkat, pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan fiskal.

Todaro dan Smith (2011) pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen yang penting, yaitu:

- 1) Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja.
- 2) Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (labor force).
- 3) Kemajuan teknologi, cara-cara baru menyelesaikan tugas.

Deliarnov, (2003) melalui analisis mikro Adam Smith menguraikan masalah pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam buku Adam Smith yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1976) mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis serta aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Smith membagi 3 unsur pokok dari sistem produksi suatu Negara dalam pertumbuhan output total adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya alam yang tersedia
- 2) Jumlah penduduk
- 3) Stok barang modal yang ada

Dalam teori pertumbuhan Adam Smith menjabarkan pendapatnya tentang pengaruh stok modal terhadap tingkat output total secara langsung dan tak langsung. Perhitungan output total dapat digunakan pada tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan persediaan modal. Pengaruh langsung ini di karenakan penambahan modal (sebagian input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tak langsung menjelaskan peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialis dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Smith menjelaskan semakin besar stok modal, semakin besar pula kemungkinan dilaksanakannya spesialisasi dan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas per kapita. Dalam unsur pokok pertumbuhan penduduk permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat (Todaro & Smith, 2011).

David Ricardo juga menjadi pemikir yang paling menonjol dalam aliran Klasik (Arsyad L, 2004). Teori yang dikembangkan Ricardo dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1917 menyangkut empat kelompok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Teori tentang nilai dan harga barang.

- 2) Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba.
- 3) Teori tentang perdagangan internasional.
- 4) Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dapat disimpulkan teori ekonomi pertumbuhan klasik ini merupakan pembangunan dalam memacu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pentingnya sumber daya alam dan stok modal dalam upaya peningkatan output sehingga produktivitas per kapita suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam teori Harrod Domar (Rizky et al., 2016) untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

3. Belanja Modal

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Anshari et al., 2018).

Menurut Halim (2008), Belanja modal merupakan biaya/belanja pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal atau investasi sebagai pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin biaya operasional dan pemeliharaan. Pengeluaran tersebut dilakukan oleh pemda untuk melaksanakan wewenang dan atas tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana serta infrastruktur baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Adanya belanja modal sebagai syarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana serta infrastruktur pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Belanja modal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang terus dicapai oleh suatu daerah selalu bisa memperbaiki infrastuktur daerah. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan dan belanja aset lainnya (Arini S, 2016).

Peran pemerintah dalam kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertumbuhan bahwa suatu daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerahnya, sehingga pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini

terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, keterkaitannya dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk dari pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai prinsipal (Arini S, 2016).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan menambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Tersedianya kebutuhan fasilitas publik membuat masyarakat akan lebih aktif dalam melakukan pekerjaannya serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investor di masing-masing daerah yang dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri & Natha, 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian yang penulis lakukan sangat diperlukan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian relevan yang menjelaskan pendapat dan hasil penelitian terdahulu dengan masalah yang penulis teliti saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Djohan et al., (2016) yang bertujuan untuk mengklarifikasi pengaruh variasi dalam pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di pulau-pulau Indonesia. Data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik untuk periode 2007-2012 (enam tahun), dengan 36 pengamatan. *Pooled* panel data

digunakan untuk memperkirakan persamaan dengan efek umum, menggunakan *Path Analysis Recursive Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kecil dan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap variasi dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh kecil dan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, variasi dalam pengeluaran pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizky et al., (2016), bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi asing langsung, investasi langsung domestik, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2010-2013. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data panel menggunakan data penampang yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi panel dengan model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan investasi langsung asing, investasi langsung domestik, dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia dari tahun 2010-2013 secara parsial dan simultan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba (2015), hasil dari penelitian menggunakan dari bentuk fungsional model semi log pada regresi data panel dimana ditemukan bahwa PDRB Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi dan Investasi berhubungan negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan. Sehingga, jika yang ingin diwujudkan adalah pemerataan pendapatan

maka diperlukan peningkatan kinerja sektor pertanian dan jasa, peningkatan upah minimum provinsi, peningkatan anggaran belanja modal dan peningkatan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Natha (2014), hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Secara Parsial, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

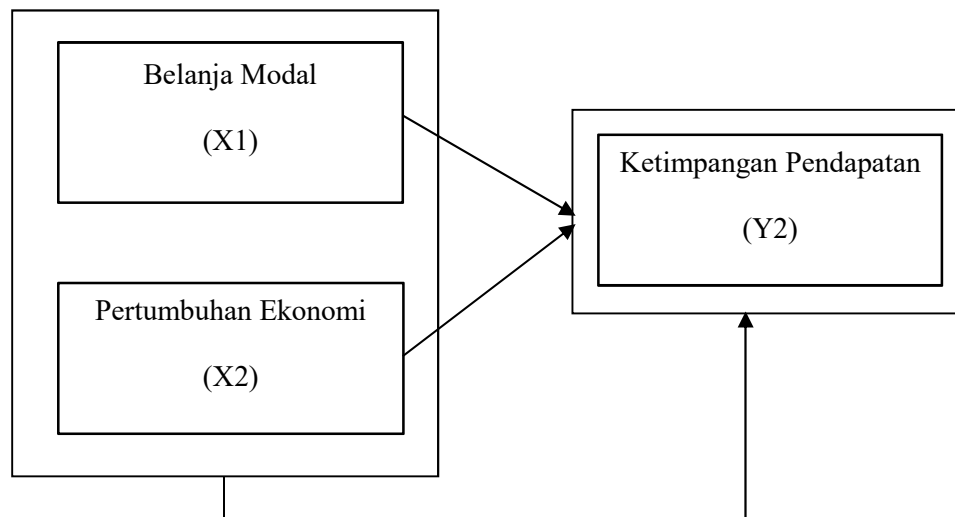
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, menerapkan, dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan dengan berpijak pada kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya pengaruh variabel belanja modal (X1) dan variabel pertumbuhan ekonomi (X2) sebagai variabel eksogen terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebagai variabel endogen.

Adanya perubahan belanja modal (X1) diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y). Artinya, alokasi belanja modal secara optimal bersinergi dengan alokasi belanja lainnya, pada tujuan makro ekonomi, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ketimpangan pendapatan terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik masyarakat akan meningkatkan investor melakukan penanaman modal yang akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi (X2) diduga memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan (Y). Artinya semakin tinggi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat ketimpangan suatu daerah. Dan sebaliknya jika ketimpangan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3

Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Diduga terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisiennya } \beta \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis regresi dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian antara variabel dependen terhadap variabel independen yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial belanja modal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.
2. Secara parsial pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.
3. Secara simultan variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. Yang berarti apabila terjadi perubahan yang positif secara simultan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen tersebut maka akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tentang analisis belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya dapat lebih meningkatkan belanja modal karena berkaitan dengan fasilitas publik. Belanja modal perlu dialokasikan

lebih efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk belanja rutin namun lebih ditekankan pada belanja modal. Sehingga realisasi belanja modal menjadi lebih terarah dan lebih efisien.

2. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang lebih baik akan mengurangi tingkat pendapatan diharapkan pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pendapatan suatu daerah bisa lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. 2018. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Arini S, P. R. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 180–198.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan* (ke-4). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Berita Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat*. 39, 19–22.
- _____. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota*.
- _____. 2019. *Berita Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat September 2018*. 06, 15–18.
- Bank Indonesia. 2018. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat*.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. 2016. Government Expenditure as Determinants of Economic Growth and Income Inequality of Inter-Province of the Islands in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(22), 148–158.
- Ekananda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel* (Kedua). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gujarati, D. N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika* (ketiga). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, A. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianhaluan.com. 2017. *Setengah APBD Sumbar untuk pendidikan, pembangunan terancam*. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/67495/setengah-apbd->